

PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PERUBAHAN POLA
PRODUKSI YANG RAMAH LINGKUNGAN

Oleh:

Ismid Hadad, M.P.A

PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PERUBAHAN POLA PRODUKSI YANG RAMAH LINGKUNGAN*

Oleh:
Ismid Hadad**

Tantangan Global & Komitmen Nasional

Penghapusan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia dewasa ini, dan karenanya menjadi syarat mutlak bagi pembangunan berkelanjutan. Maka itu para pemimpin negara sedunia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York tahun 2000 menetapkan upaya mengurangi separuh dari kemiskinan di dunia sebagai "**Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals*)**" bagi negara-negara anggota PBB yang harus dicapai pada tahun 2015 melalui 8 jalur sasaran :

- mengurangi separuh proporsi penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari 1 dollar AS per hari dan proporsi penduduk yang menderita kelaparan;
- mengurangi separuh proporsi jumlah penduduk yang tidak memiliki akses pada air minum yang sehat;
- menjamin semua anak, laki-lakidan perempuan, menyelesaikan sekolah dasar;
- menurunkan hingga 2/3 kematian bayi & anak dibawah usia lima tahun;
- menghentikan penyebaran penyakit HIV / AIDS, malaria dan jenis penyakit menular lainnya;
- menghilangkan ketidaksetaraan gender di sekolah;
- menerapkan dengan konsekuen kebijakan pembangunan berkelanjutan;
- mengembangkan kemitraan untuk pembangunan di semua tingkatan.

Komitmen semua bangsa di dunia untuk menghapus kemiskinan dari muka bumi ini ditegaskan dan dikokohkan kembali dalam "**Deklarasi Johannesburg mengenai**

* Makalah untuk pembahasan topik "Pembangunan Berkelanjutan, Pengentasan Kemiskinan dan Sikap Masyarakat terhadap Produk Ramah Lingkungan" disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke-VIII dengan tema "Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Nasional Berkelanjutan" diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Departemen Kehakiman dan HAM RI. Tanggal 14-18 Juli 2003 di Kuta, Bali.

** Direktur Eksekutif, Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), Jakarta.

Pembangunan Berkelanjutan" yang disepakati oleh para Kepala Negara/Pemerintahan dari 165 negara yang hadir pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan, bulan September 2002 yang lalu dan kemudian dituangkan dalam dokumen "**Rencana Pelaksanaan KTT Pembangunan Berkelanjutan**", yang juga telah ditanda-tangani oleh Presiden RI, Megawati Sukarnoputri, untuk menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia.

Dengan demikian, Indonesia telah membuat komitmen nasional untuk memberantas kemiskinan dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dimana pemerintah dan semua perangkat negara bersama dengan berbagai unsur masyarakat memikul tanggungjawab utama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan sekaligus pengentasan kemiskinan tsb paling lambat tahun 2015.

Untuk itu, sesuai dengan butir II paragraf 7 dokumen Johannesburg tentang "Rencana Pelaksanaan KTT Pembangunan Berkelanjutan" (*Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development*), Pemerintah Indonesia sepakat untuk menempuh langkah-langkah pengentasan kemiskinan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2015, mengurangi separuh proporsi penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari 1 dollar AS per hari dan proporsi penduduk yang menderita kelaparan, dan pada tahun yang sama, mengurangi separuh proporsi jumlah penduduk yang tidak memiliki akses pada air minum yang sehat;
2. Membentuk dana solidaritas dunia untuk penghapusan kemiskinan dan memajukan pembangunan sosial dan manusia di Indonesia;
3. Mengembangkan program nasional bagi pembangunan berkelanjutan dan pengembangan masyarakat daerah lokal dalam lingkup strategi nasional pengurangan kemiskinan, meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat miskin serta organisasi kelompok masyarakat tsb;
4. Memajukan akses yang sama dan partisipasi penuh kaum perempuan, berdasarkan prinsip kesetaraan dengan pria, dalam pengambilan keputusan pada semua tingkatan, mengarus-utamakan perspektif gender dalam semua kebijakan dan strategi pembangunan, serta penghapusan semua bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan;
5. Mengembangkan kebijakan, cara-cara dan sarana untuk meningkatkan akses masyarakat adat/penduduk asli dan komunitas mereka terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi, dengan memperhatikan hakekat ketergantungan mereka selama ini pada ekosistem alami dimana mereka hidup dan bekerja;
6. Menyediakan pelayanan kesehatan dasar untuk semua kelompok masyarakat dan mengurangi ancaman terhadap kesehatan yang berasal dari lingkungan;
7. Menjamin bahwa anak-anak di manapun juga, baik laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar serta memperoleh akses dan kesempatan yang sama pada semua tingkatan pendidikan;
8. Menyediakan akses pada sumber daya pertanian bagi masyarakat miskin. khususnya perempuan dan komunitas masyarakat adat/penduduk asli;

9. Membangun prasarana dasar pedesaan, diversifikasi ekonomi dan perbaikan transportasi, serta akses pada pasar, kemudahan informasi pasar dan kredit bagi masyarakat miskin pedesaan, untuk mendukung pembangunan pedesaan dan pertanian secara berkelanjutan;
10. Melaksanakan alih pengetahuan dan tehnik dasar pertanian berkelanjutan, termasuk pengelolaan sumber daya alam secara lestari, untuk petani dan nelayan skala kecil dan menengah, serta masyarakat miskin di pedesaan, termasuk melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait;
11. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan, dengan memajukan pola kemitraan produksi pangan berbasis masyarakat;
12. Memerangi kekeringan dan peng-“gurun”-nan lahan, serta mengurangi dampak bencana kekeringan dan bencana banjir, melalui langkah-langkah seperti penggunaan informasi dan prakiraan iklim dan cuaca, sistem peringatan dini, pengelolaan sumber daya tanah dan alam secara lestari, penerapan praktik pertanian dan konservasi ekosistem yang ditujukan untuk membalikkan dan mengurangi kecenderungan degradasi tanah dan sumber daya air;
13. Meningkatkan akses pada sanitasi untuk memperbaiki kesehatan manusia dan mengurangi angka kematian bayi dan “balita”.

Kinerja Indonesia masih rendah

Kendati Indonesia ikut serta dalam kesepakatan global melaksanakan “*Millenium Development Goals (MDG)*” untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dicanangkan PBB sejak 2000, namun dalam “*Human Development Report 2003*” atau “*Laporan Pembangunan Manusia tahun 2003*” yang dikeluarkan oleh United Nations Development Program (UNDP) baru-baru ini, menunjukkan bahwa kualitas manusia Indonesia makin memburuk dalam 10 tahun terakhir ini. Dalam laporan tsb, *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang diukur dari pendapatan, riil per kapita, tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf dan kualitas pendidikan dasarnya, ternyata peringkat Indonesia menurun dari 110 menjadi peringkat 112 dari 175 negara yang dinilai UNDP. Di kalangan negara anggota ASEAN, peringkat Indonesia itu jauh dibawah Filipina dan Thailand, bahkan berada dibawah Vietnam.

Menurut Laporan UNDP 2003 itu, penurunan IPM Indonesia menunjukkan tidak adanya perbaikan yang berarti dalam kurun waktu 1990 s/d 2001, dilihat dari beberapa indikator penting IPM, terutama pengurangan angka kemiskinan. Disebutkan dalam laporan tsb bahwa 7,2% penduduk Indonesia masih hidup dalam kondisi kemiskinan absolut, dan 26% anak-anak di bawah usia 5 tahun mengalami kekurangan gizi yang cukup parah. Selain itu, upaya menekan angka kematian ibu yang melahirkan selama ini juga tidak menunjukkan hasil yang signifikan, sedangkan kualitas pendidikan sekolah dasar makin memprihatinkan. Jumlah anak didik yang bisa menikmati pendidikan sekolah dasar pada 1990-2001 menurun tajam, terutama sejak terjadinya krisis ekonomi-moneter 1997.

Syarat Keberhasilan Pengentasan Kemiskinan

Seperti disebutkan di atas, pemberantasan kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang sangat kompleks dan mempunyai dimensi tantangan lokal, nasional maupun global. Upaya mengatasi masalah kemiskinan karenanya tak bisa dilepaskan dari strategi nasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu negara. Kita tahu bahwa ada 3 persyaratan pokok bagi tercapainya pembangunan berkelanjutan:

- Pengentasan kemiskinan,
- Perubahan pola konsumsi dan produksi yang tidak menunjang keberlanjutan, dan
- Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari.

Selain itu program pengentasan kemiskinan juga tak mungkin berjalan tanpa adanya tata-kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagai dasar bagi terlaksananya pembangunan berkelanjutan di manapun, termasuk dan terutama di Indonesia, yang diantaranya ditandai oleh berjalannya:

- sistem pemerintahan yang demokratis, transparan dan bertanggung gugat kepada publik;
- kebijakan ekonomi, sosial dan lingkungan yang dirancang dan dilaksanakan secara terpadu dan partisipatif;
- lembaga-lembaga demokratis yang tanggap (responsif) terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
- peraturan hukum dan perundang-undangan yang ditaati dan dilaksanakan secara konsisten dan adil;
- upaya pemberantasan korupsi yang dilaksanakan secara tegas tanpa pandang bulu;
- pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta hak-hak dan kepentingan masyarakat adat dan kelompok masyarakat rentan.

Kemiskinan dan sumber daya murah dan ramah lingkungan

Bagi Indonesia, melaksanakan 13 langkah pengentasan kemiskinan sebagaimana tercantum dalam butir II.7 dari "Rencana Pelaksanaan KTT Pembangunan Berkelanjutan" tersebut di atas merupakan pilihan strategi nasional yang tidak boleh ditawar lagi. Namun langkah tersebut juga wajib disertai dengan strategi dan langkah lain yang menunjang, khususnya berkaitan dengan strategi pengadaan air bersih dan sanitasi yang memadai serta peningkatan akses pada sumber daya dan layanan energi yang handal, ramah lingkungan, dan terjangkau serta layak secara ekonomi dan sosial.

Pengadaan air minum yang bersih dan sanitasi yang memadai bukan hanya penting untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan pada umumnya, tetapi terutama

karena merupakan kebutuhan pokok bagi mayoritas penduduk miskin yang tidak mendapat akses pada sanitasi dasar yang mereka butuhkan untuk hidup secara layak. Karena itu perlu dikembangkan sistem sanitasi rumah tangga yang efisien, praktek dan teknologi yang terjangkau dan dapat diterima secara sosial-budaya, serta mengembangkan sistem dan mekanisme pembiayaan untuk pengelolaan sumber daya air dan pengadaan air bersih bagi masyarakat yang tidak dilandasi pertimbangan komersial belaka.

Masyarakat miskin di Indonesia juga sangat membutuhkan sumber daya dan layanan energi yang ramah lingkungan dan terjangkau secara ekonomi. Ini berarti harus dihindari dan dikurangi penggunaan kayu bakar yang diambil dari hutan atau kebun, ataupun penggunaan bahan energi yang berasal dari "*fossil fuel*" seperti minyak bumi dan batu bara yang kotor, menimbulkan pencemaran udara, dan membawa dampak pada perubahan iklim. Langkah perubahan ini membutuhkan perangkat kebijakan dan sistem yang menunjang transisi ke arah peningkatan efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan (*renewable energy*), energi biomasa, dan penggunaan bahan bakar fosil cair dari gas yang lebih bersih yang lebih akrab lingkungan, lebih murah dan dapat diterima secara sosial.

Perubahan pola konsumsi dan produksi ramah lingkungan

Strategi pengurangan kemiskinan tidak akan berhasil apabila tidak diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan yang secara sadar merubah pola konsumsi masyarakat dan cara-cara produksi yang tidak menunjang keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Karena makin luas dari besarnya kerusakan, degradasi dan pencemaran lingkungan yang terjadi selama ini adalah akibat langsung dari penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam – terutama yang yang tak terbarukan – secara berlebihan, boros dan tak bertanggungjawab yang sebagian terbesar dilakukan oleh dan melalui sistem industri modern.

Kebutuhan masyarakat dan industri modern membuat sumber daya air, energi, mineral, hutan, laut, semuanya diambil dan dikuras habis dari alam, tanpa mempedulikan ambang batas dan daya dukung lingkungannya. Eksploitasi secara besar-besaran terhadap berbagai sumber daya alam itu dilakukan dengan sistem, teknologi, peratatan dan cara-cara yang menghasilkan limbah B3 dan pencemaran lingkungan, merusak ekosistem, merampas hak-hak masyarakat adat, dan menyengsarakan kehidupan masyarakat sekitarnya.

Perubahan pola konsumsi dan produksi itu memang harus didahului oleh negara-negara industri maju yang telah menikmati kekayaan dan kenyamanan hidupnya dari hasil eksploitasi usahanya yang telah membawa kerusakan lingkungan dan sosial di negara-negara berkembang. Mata rantai proses globalisasi yang mengaitkan pertumbuhan ekonomi negara kaya dengan degradasi lingkungan di negara miskin harus diputus .

Akan tetapi secara nasional, Indonesia juga perlu menumbuhkan program peningkatan kesadaran mengenai pentingnya pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dengan menerapkan azas "pencemar membayar" (*polluter pays principle*), menerapkan prinsip

eko-efisiensi, memberi insentif bagi penghematan & efisiensi energi, menunjang investasi dibidang produksi bersih dan ramah lingkungan, penggunaan analisis daur hidup (*life-cycle analysis*) dan lain sebagainya, sehingga mendorong terjadinya perubahan pola konsumsi dan produksi yang lebih menjamin kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat kecil.

Kuta, Bali, 15 Juli 2003.